

Strengthening Village Accountability Through Socialization and Community Participation in the Concept of Good Governance

Maria Helena Kono Naiobe¹, Natalisio S. Miranda², Romario Finsensius S.T Ati³, Karolus Tatu Sius⁴, Yasinta Palan Peten⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

E-mail : mariahelena@gmail.com¹. natalisiomiranda73@gmail.com². stivanati584@gmail.com³. karolustatusius@gmail.com⁴, yasintapeten@gmail.com⁵



<https://doi.org/10.36526/gandrung.v6i2.5678>

Abstract: *An understanding of government as an ever-changing organization must be able to be adapted to certain situations. This is why the idea of good governance is the basis for the government to do its best for the whole of society. socialization about realizing village accountability in the concept of good governance in the form of delivering material carried out by students of Widya Mandira Kupang Catholic University. interviews with the Ngegedhawe Village government regarding activities that will be carried out later. interviews through a question and answer process for implementing socialization activities where the aim of holding this socialization is to be an activity that reminds the Village government to realize village accountability in the concept of good governance resulting in increased understanding regarding the principles of good governance, especially accountability, transparency and participation, the importance of using Village Funds responsibly, according to applicable planning and regulations, as well as involving the community in the planning process, implementation and supervision. Socialization encourages the community to actively participate in planning, implementing and supervising Village activities, such as participating in MusrenbangdesDes and supervising and implementing the Village APBD. Increasing awareness of the community and Village government is important for the community to participate in development. This activity is attended by several Village communities together with Village officials/government. Through socialization activities, it is hoped that in the future the community will participate in Village development or also in decision making, creating a good environment so that in the future the community and Village government can work to build the Village for the better.*

Keywords: *Good Governance, Village Government, Accountability, Transparency.*

Pendahuluan

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi kebutuhan mendesak di era otonomi desa saat ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang harus dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan desa yang bersih, profesional, efektif, dan efisien, serta bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (Arini Dian Setiawati, 2019).

Akuntabilitas desa tidak dapat terwujud hanya melalui peran pemerintah desa semata, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama (Ummah, 2019). Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pengontrol, pengawas, dan pemberi masukan terhadap setiap kebijakan dan penggunaan dana desa. Keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi Namun, dalam praktiknya, desa Ngegedhawe masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, seperti rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi, kurangnya pengawasan eksternal, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan (Zaman & Nurdiwaty, 2020). Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas desa melalui sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Melalui kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun sistem pengelolaan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah desa ngegedhawe adalah kurangnya antusiasme masyarakat tidak menunjukkan minat yang besar untuk menghadiri rapat, jumlah peserta rapat yang hadir sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang seharusnya hadir, masyarakat tidak menyadari pentingnya partisipasi dalam rapat dalam pembangunan desa dengan demikian kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran dan antusiasme (Uceng et al., 2019). Untuk itu pemerintah desa perlu melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rapat dan proses pembangunan desa.

Berbagai penelitian terbaru menunjukkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan prinsip demokrasi dan mekanisme sosial yang sangat penting untuk mempercepat pembangunan di tengah perubahan sosial yang terjadi, karena tingginya partisipasi masyarakat dapat menciptakan akuntabilitas dalam fungsi pemerintahan desa melalui institusionalisasi peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. (Arianto, 2023) menjelaskan penerapan prinsip *good governance* yang mendukung terciptanya keseimbangan kontrol antara pemerintah desa dan masyarakat agar tata kelola pemerintahan desa berjalan efektif dan akuntabel.

Berdasarkan temuan empiris serta data yang diperoleh mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Ngegedhawe, terlihat perlunya upaya edukasi kepada masyarakat. Edukasi

ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman warga mengenai urgensi keterbukaan informasi, seperti anggaran, rencana kegiatan, dan laporan keuangan, serta cara mengakses informasi tersebut. Masyarakat yang telah memperoleh pemahaman akan lebih percaya diri dan mampu mengajukan pertanyaan atau menuntut kejelasan dari pemerintah desa jika terjadi ketidaksesuaian. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan desa, mendorong terwujudnya prinsip akuntabilitas, serta menanamkan budaya demokratis yang sehat dan berkelanjutan di tingkat lokal (Hartati et al., 2023). Dengan demikian, edukasi menjadi landasan utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang terbuka, partisipatif, bertanggung jawab, serta tanggap terhadap kebutuhan warganya. Melalui peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat, diharapkan akan terbentuk mekanisme kontrol sosial yang efektif serta hubungan yang lebih sinergis antara pemerintah desa dan masyarakat.

Metode

Kegiatan sosialisasi mewujudkan akuntabilitas desa dalam konsep good governance kepada masyarakat dan pemerintah Desa di Desa Ngegedhawe dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Mei 2025, yang berlokasi di Balai Kantor Desa Ngegedhawe, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Dengan Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang mewujudkan akuntabilitas desa dalam konsep good governance berupa penyampaian materi yang dilakukan oleh mahasiswi Universitas Katholik Widya Mandira Kupang. Metode pelaksanaan kegiatan dimulai sejak sampai di lokasi Desa dan diikuti langsung dengan melakukan survei lokasi terkait partisipasi mewujudkan akuntabilitas desa dalam konsep good governance. Survei lapangan merupakan tahapan awal yang perlu untuk dilakukan dalam merancang suatu kegiatan terkhusus dalam perencanaan kerja yang dapat menjadi landasan awal untuk kita dapat mengetahui bagaimana keadaan ataupun letak keadaan tanah maupun lokasi daerah yang akan kita pakai untuk kegiatan di Desa tersebut agar dapat dikembangkan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan nanti.

Setelah survey lokasi selesai kegiatan lanjutan yaitu dengan melakukan wawancara pada pemerintah Desa Ngegedhawe terkait kegiatan yang akan dilakukan nantinya. Wawancara diartikan sebagai suatu proses untuk mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan informasi secara langsung atau lisan melalui proses tanya jawab yang berlangsung ketika berada di lapangan yang dapat menghasilkan jawaban-jawaban real atau nyata sesuai dengan permasalahan di lapangan. Cara ini bertujuan agar dapat memperoleh keterangan langsung dari pemberi informasi dengan diberikannya ide awal sebagai landasan atau keterangan serta gambaran besar.

Dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dimana tujuan dari diadakannya sosialisasi tersebut agar menjadi suatu kegiatan yang mengingatkan pemerintah Desa bahwa dengan sosialisasi mewujudkan akuntabilitas desa dalam konsep good governance sangatlah penting dikarenakan tolak ukur penerapan tata kelola yang baik, akuntabilitas memastikan pemerintah Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana dan tindakan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Hasil dan Diskusi

Meningkatnya pemahaman tentang konsep tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, merupakan hasil sosialisasi untuk mewujudkan akuntabilitas desa dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik (Calnen, 2010). Pembahasan tambahan menyoroti betapa pentingnya menggunakan Dana Desa secara bijaksana, sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.. Peningkatan Pemahaman: Sosialisasi berhasil meningkatkan kesadaran pemerintah Desa dan masyarakat tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Peran Akuntabilitas Sosialisasi menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, yaitu memastikan Dana digunakan sesuai rencana dan peraturan. Fungsi Keterbukaan Berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan mengawasi serta melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) hanyalah dua contoh bagaimana sosialisasi mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional desa. Mengapa Musyawarah Itu Penting Untuk menggali kepentingan bersama dan menetapkan skala prioritas kepentingan tersebut, sosialisasi sangat menekankan pentingnya musyawarah desa (Satria Mentari Tumbel, 2014).



Gambar 1. Dokumentasi penyampaian materi sosialisasi Bersama pemerintah desa dan Masyarakat desa Ngedehawe

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik sebagai Dasar Sosialisasi menyoroti perlunya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai dasar untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Pemanfaatan Dana Desa Makna penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa yang berkelanjutan dibahas lebih rinci. Peran masyarakat: Perlunya keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mengatur operasi desa, terutama pemantauan penggunaan dana desa, ditekankan dalam percakapan. Kepercayaan Publik Sosialisasi menekankan bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik berkontribusi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa (Abustun, 2019). Pencegahan Penyimpangan: Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dapat membantu mencegah penyalahgunaan keuangan desa dan meningkatkan standar layanan publik. Pentingnya ikut serta dalam pembangunan desa merupakan saran lain untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat di Desa Ngedehawe.

Kesimpulan

Di Desa Ngedehawe Partisipasi masyarakat kurang aktif atau berpartisipasi dalam konsep pembangunan Desa Karena masih terdapat hambatan seperti rasa minder akibat minimnya pendidikan sehingga mengakibatkan masyarakat kurang aktif atau kurang berpartisipasi dalam mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh pemerintah Desa. Adapun juga rasa malas yang timbul di diri mereka masing-masing

diakibatkan karena seringkali pendapat mereka sering diabaikan atau tidak di dengar. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada hari Selasa, 6 Mei 2025 di Balai Kantor Desa Ngegedhawe bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah Desa bahwa sangatlah penting bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa masyarakat Desa bersama dengan aparat/pemerintah Desa. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan agar kedepannya masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa ataupun juga dalam pengambilan keputusan, Dukungan dari masyarakat sangatlah penting sehingga dapat menciptakan lingkungan yang baik sehingga kedepannya masyarakat dan pemerintah Desa bisa bekerja untuk membangun Desa tersebut menjadi lebih baik lagi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan restunya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dari mulai persiapan sampai dengan selesai. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak pejabat Desa Ngegedhawe yaitu Bapak Fransiscus Karae, beserta bapak/ibu aparat Desa yang telah bersedia menerima dan juga membimbing kami selama melakukan kegiatan di Desa Ngegedhawe serta masukan-masukan yang telah diberikan kepada kami agar menjadi lebih baik lagi kedepannya. Ucapan terimakasih banyak juga kepada orang tua asuh penulis yaitu Bapak Arkadius Djawa dan juga Mama Herlina Selaku kedua orang tua asuh kami yang telah bersedia menerima kami di Rumah, Terimakasih juga kepada Kk dan adik-adik yang ada di rumah Desa Ngegedhawe. Terimakasih juga saya ucapkan kepada masyarakat, OMK dan Karang Taruna yang menerima kami di Desa Ngegedhawe selama 2 bulan, Terimakasih buat moment serta keakraban selama kami berada di Desa Ngegedhawe.

Daftar Pustaka

- Abustun, A. (2019). Implementasi Percepatan Pembangunan Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(02), 216–227. <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7701>
- Arianto, B. (2023). Tata kelola media sosial sebagai institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 16(2), 106–127. <https://doi.org/10.24123/jati.v16i2.5644>
- ARINI DIAN SETIAWATI. (2019). Akuntabilitas Birokrasi Pejabat Pemerintahan Dalam Rangka Tercapainya Prinsip-Prinsip Good Governance. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11),

951–952., 5–48.

- Calnen, G. (2010). Good governance. *Breastfeeding Medicine*, 5(6), 323–324. <https://doi.org/10.1089/bfm.2010.9977>
- Hartati, A., Palopa, R., & Mahmud, S. (2023). Pendampingan Desa Dalam Penguatan Demokrasi Dan Good Governance Di Desa Sayambongin Kec. Nambo Kab. Banggai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 3(5), 3–6. <https://doi.org/10.59818/JPM>
- Satria Mentari Tumbel. (2014). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus desa Tumaluntung satu kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)*.
- Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 18–32. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2126>
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Zaman, B., & Nurdiwaty, D. (2020). Penerapan prinsip good dalam pengelolaan alokasi dana desa (studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi Peta*, 5(1), 65–84. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/419>